

# OTORITAS BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH (BPAD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI KOORDINATOR KERJA SAMA DAN JARINGAN JOGJA LIBRARY FOR ALL

Raki Faisal Anas<sup>\*)</sup>, Rizki Nurislaminingsih

*Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

## Abstrak

*Kegiatan jejaring perpustakaan di Indonesia tergolong masih jarang dilakukan oleh beberapa perpustakaan. Jumlah jaringan dan kerja sama perpustakaan masih sedikit, salah satunya adalah Jogjalib for All. Jaringan perpustakaan ini merupakan jaringan antar perpustakaan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada berbagai macam perpustakaan di dalamnya antara lain perpustakaan sekolah, umum, dan perguruan tinggi. Hal yang menarik adalah jaringan perpustakaan ini telah bertahan selama lebih dari satu dekade. Maka peneliti tertarik untuk meneliti proses manajerial, khususnya manajerial dari koordinator Jogjalib for All, yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Judul dari penelitian ini adalah "Otoritas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Koordinator dalam Kerja sama dan jaringan Jogjalib for All". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana otoritas/kewenangan yang dilakukan oleh BPAD DIY sebagai koordinator dalam melakukan manajerial terhadap Jogjalib for All. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan metode naratif. Pengumpulan data pada penelitian ini hasil wawancara dengan informan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Jogjalib for All sejumlah 10 orang. Pemilihan informan tersebut dilakukan dengan cara non-probability sampling dengan bentuk purposive sampling. Hasil analisis yang didapatkan adalah BPAD DIY selaku koordinator jaringan perpustakaan telah melakukan tugasnya dengan baik. Kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh BPAD DIY tidak menunjukkan bahwa BPAD DIY merupakan koordinator yang otoriter.*

**Kata kunci:** *jaringan perpustakaan, kerja sama perpustakaan, manajemen*

## Abstract

*[Title: Authority Library and Archive Region of Yogyakarta as Coordinator of Jogja Library for All Cooperation and Networking]. Library network activities in Indonesia are still rarely carried out by some libraries. The number of networks and cooperation isn't too much, one of them is Jogjalib for All. This library network is a network between libraries in the province of Yogyakarta. There are various libraries in it, among others, the school library, public, and college. The interesting thing is the library network has survived for more than a decade. So researchers are searching for the managerial process, especially managerial from coordinator Jogjalib for All, it was Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta. The purpose of this study was to determine how the authority conducted by BPAD DIY as a coordinator in performing managerial against Jogjalib for All. The methodology used is qualitative narrative method. Collecting data in this study informant interviews with Executive Team Development Activity Jogjalib for All number 10 people. Selection of informants is done by non-probability sampling with purposive sampling form. The analysis result obtained is BPAD DIY coordinator of the library network has been doing a good job. Powers performed by BPAD DIY not indicate that an authoritarian coordinator.*

**Keywords:** *library network, library cooperation, management*

## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam. Masyarakat Indonesia terbagi berdasarkan beberapa demografi seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan

budaya. Pembagian masyarakat berdasarkan pendidikan dapat digolongkan dari tamatan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sarjana, magister,

---

<sup>\*)</sup>Penulis Korespondensi  
Email: rakifaisalanas@gmail.com

hingga doktor. Pendidikan di masyarakat dimulai sejak bangku sekolah dasar (SD) dan akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tidak dengan cara yang mudah. Ada beberapa standar yang diterapkan untuk memasuki ke pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat harus menempuh semacam ujian untuk membuktikan bahwa siap menghadapi pendidikan yang lebih tinggi. Selain motivasi untuk lulus dalam ujian tersebut, masyarakat perlu mendapat dukungan dari luar (eksternal).

Bentuk dukungan dari luar bisa didapat dari pemerintah, dengan mengucurkan alokasi dana khusus untuk bidang pendidikan, penyelenggaraan sekolah gratis bagi masyarakat tidak mampu, dan tidak terkecuali adalah penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat. Artinya, perpustakaan mendukung pendidikan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang tanpa akhir. Adanya perpustakaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan sifat gemar membaca masyarakat Indonesia.

Hak masyarakat atas perpustakaan seperti memperoleh layanan perpustakaan secara umum dan khusus, telah diatur di dalam undang-undang tentang perpustakaan. Permasalahannya, perpustakaan di Indonesia belum mampu merangkul masyarakat sampai ke wilayah terpencil. Seperti yang telah diketahui, masih ada kesenjangan pemerataan pembangunan di Republik Indonesia. Masalah yang lain adalah perpustakaan juga belum dapat memberikan informasi yang kompleks untuk menunjang pendidikan formal maupun non-formal. Selain adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur, dapat dirasakan juga adanya perbedaan dalam pelayanan informasi untuk masyarakat. Adakah usaha pemerintah nasional maupun daerah untuk mengatasi kesenjangan informasi ini ?

Lantas, penyebab dibalik permasalahan kesenjangan pengetahuan dalam masyarakat masih menjadi renungan. Padahal, perpustakaan ada di setiap kota, perpustakaan tidak membebani pemustaka dengan biaya yang tinggi untuk mengakses sumber informasi, bahkan ada perpustakaan yang memberikan bebas biaya untuk menjadi anggotanya. Namun, pemustaka belum tentu tahu, tingkat kelengkapan dan keberagaman sumber informasi dari perpustakaan yang berdiri. Tidak mungkin juga untuk diteliti satu persatu koleksi perpustakaan kemudian dibandingkan dengan perpustakaan lain.

Pengertian kerja sama antar perpustakaan adalah kerja sama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Di samping konsep kerja sama berkembang pula konsep jaringan (*network*) di mana selain melibatkan perpustakaan juga melibatkan organisasi lain yang berkecimpung dalam bidang-bidang informasi seperti

pusat informasi, pusat dokumentasi, clearing house, pusat rujukan, pusat analisa informasi dan lain-lain (Sulistyo-Basuki, 1992).

Berkaitan dengan jaringan perpustakaan, akan dibahas mengenai keorganisasian. Jaringan perpustakaan juga termasuk dalam organisasi karena di dalamnya terdapat struktur yang memiliki fungsi seperti koordinator, anggota jaringan, dan pihak eksternal yang terlibat dalam jaringan. Koordinator tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan perjalanan organisasi. Keputusan-keputusan harus disetujui melalui koordinator, seperti kebijakan, komando, monitor anggota, hingga evaluasi organisasi.

### 1.1 Kerja Sama dan Jaringan Perpustakaan

Menurut Sulistyo-Basuki, (1996: 1) yang dimaksud kerja sama antar perpustakaan adalah “Kerja sama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih tanpa mempersoalkan apakah kerja sama tersebut menggunakan teknologi informasi telekomunikasi atau tidak”.

Di samping konsep kerja sama berkembang pula konsep jaringan (*network*) di mana selain melibatkan perpustakaan juga melibatkan organisasi lain yang berkecimpung dalam bidang-bidang informasi seperti pusat informasi, pusat dokumentasi, clearing house, pusat rujukan, pusat analisa informasi dan lain-lain (Sulistyo-Basuki, 1992).

Kerja sama dan jaringan perpustakaan sudah menjadi hal yang wajar dan harus dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Jaringan dalam bentuk organisasi dijadikan instrumen dalam kegiatan komunikasi informasi antar perpustakaan yang dilakukan secara formal untuk melayani kebutuhan pemustaka. Fungsi yang diberikan dari kerja sama dan jaringan perpustakaan adalah untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap koleksi, memperbaiki pelayanan pengguna, meningkatkan aktivitas berbagi sumber informasi, dan mengurangi adanya duplikasi koleksi di perpustakaan-perpustakaan (Hasan, 2007).

Dari beberapa definisi yang diberikan pada paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kerja sama dan jaringan perpustakaan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa perpustakaan. Kerja sama tersebut dapat dilakukan antar perpustakaan atau perpustakaan dengan lembaga informasi lainnya. Pelaksanaan kerja sama dan jaringan tersebut dapat dilakukan dengan metode konvensional atau dengan metode modern (dengan bantuan teknologi informasi dan telekomunikasi). Seperti halnya yang dilakukan oleh Jogjalib for All, jaringan tersebut telah

menerapkan kegiatan jaringan berbasis internet (memakai teknologi telekomunikasi).

Beberapa perpustakaan yang tergabung dalam struktur jaringan perpustakaan saling terintegrasi melalui komunikasi yang dipimpin oleh koordinator jaringan. Koordinator jaringan dipilih berdasarkan kesepakatan, namun pada umumnya adalah koordinator dipilih berdasarkan atas kekuatan dari perpustakaan dalam menaungi anggota jaringan. Sebuah jaringan perpustakaan memerlukan koordinator agar terdapat satu pusat komando dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan jaringan.

### **1.2 Tujuan Kerja Sama dan Jaringan Perpustakaan**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan maupun organisasi lain, selalu ada hal yang mendasari kegiatan tersebut yang dijadikan tujuan diadakan kegiatan. Pada kenyataannya, permasalahan utama yang dihadapi oleh perpustakaan bahwa perpustakaan tidak dapat menampung semua sumber informasi.

Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya kesadaran bersama antar perpustakaan untuk saling berbagi materi dan informasi satu sama lain. Selain alasan itu, adapun alasan lain yang juga mempengaruhi terjadinya kerja sama perpustakaan, yaitu adalah masalah finansial. Perpustakaan tidak perlu membutuhkan biaya untuk pengadaan buku yang langka dan mahal, hal tersebut dapat diupayakan dengan melakukan kerja sama pinjam meminjam koleksi ke perpustakaan lain.

Menurut Clayton dan Gorman (2001: 54) adapun alasan kerja sama yang dilakukan oleh perpustakaan antara lain:

1. Mengisi kesenjangan yang ada di beberapa bidang yang spesifik dalam semesta pengetahuan dan mengurangi duplikasi kepemilikan.
2. Mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen koleksi dan usaha pengembangan di antara perpustakaan yang berhubungan.
3. Mengkoordinasi rencana perkembangan koleksi di masa depan.
4. Menciptakan kesamaan tanggung jawab dalam penyimpanan yang telah disepakati.
5. Memiliki lisensi situs bersama untuk berbagi basis data.
6. Mengkoordinasi keputusan manajemen koleksi yang berhubungan dengan preservasi penyimpanan, penyiangan, dan lain-lain.

### **1.3 Syarat Kerja Sama dan Jaringan Perpustakaan**

Jaringan perpustakaan tidak dibentuk begitu saja, beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu jaringan perpustakaan. Syarat tersebut bermanfaat agar jaringan perpustakaan tidak terjadi kesalahpahaman dalam keberlangsungan jaringan perpustakaan. Syarat biasanya digunakan untuk mengkualifikasi bidang apa saja yang nantinya akan dijadikan dasar pembentukan jaringan perpustakaan.

Ishak (2008: 7) memberikan poin-poin tentang syarat kerja sama antar jaringan perpustakaan, antara lain:

1. Kesepakatan tertulis/tidak tertulis
2. Perpustakaan memiliki sumber daya informasi yang telah terorganisir dengan baik, sistem temu kembali berjalan dengan lancar, up to date, dan adanya jaminan pertumbuhan koleksi secara dinamis.
3. Sumber daya informasi terbuka untuk umum. Artinya adanya jaminan bahwa koleksi selalu tersedia dan siap digunakan perpustakaan lain.
4. Memiliki anggaran tetap (rutin) untuk pengembangan sumber daya informasi.
5. Tersedia petugas yang bertanggung jawab untuk pengelolaan kerja sama antar jaringan perpustakaan.

Selain itu, Ishak (2008: 3) juga memberikan tiga poin yang paling mendasar dalam syarat untuk berlangsungnya suatu jaringan perpustakaan, antara lain:

1. Perpustakaan sebagai anggota jaringan harus memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain.
2. Perpustakaan yang bekerja sama harus memiliki kemauan untuk membagi sumber informasi apa yang dimiliki kepada perpustakaan lain.
3. Perpustakaan yang bekerja sama memiliki kesepakatan tentang bentuk jaringan dan mekanisme dalam pelaksanaan kerja sama.

### **1.4 Jaringan Perpustakaan sebagai Organisasi**

Domainko memberikan pandangan organisasi merupakan kegiatan komunikasi dan koordinasi. Max Weber memberikan pandangan yang berbeda yaitu, organisasi merupakan cara bagaimana menggabungkan layanan. Berbeda dari keduanya, Mooney dan Riley teknik mengatur dan menghubungkan proses. Sedangkan Mellerowicz mengatakan bahwa organisasi merupakan persiapan yang sistematis dan terencana oleh orang. Ditarik benang merah dari gagasan-gagasan tersebut, maka

dapat dipahami karakteristik dari organisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia dalam melakukan penggabungan proses dan koordinasi untuk mewujudkan sebuah tujuan yang telah ditetapkan (Ivanko, 2013).

Organisasi dibentuk atas dasar kesadaran manusia dan dilaksanakan berdasarkan tujuan yang sama yang telah disepakati. Ketika pembentukan organisasi, hal tersebut menimbulkan adanya prinsip atau asas dalam berorganisasi. Prinsip yang kemudian menjadi inti dari birokrasi dan komunikasi di dalam tubuh organisasi dibentuk dengan maksud agar organisasi dapat diatur dengan jelas sesuai dengan pembagian kerjanya.

Adapun prinsip-prinsip manajemen organisasi yang paling mendasar dikemukakan oleh Henry Fayol (1925) adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kerja
2. Otoritas dan tanggung jawab
3. Disiplin
4. Kesatuan komando
5. Kesatuan arah
6. Mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan umum
7. Remunerasi
8. Sentralisasi
9. Rantai scalar / garis wewenang
10. Tata tertib
11. Keadilan
12. Stabilitas masa kerja para pegawai
13. Inisiatif
14. Semangat kesatuan

### 1.5 Otoritas di dalam Organisasi

Organisasi merupakan perilaku yang dilakukan secara sadar oleh manusia dalam melakukan penggabungan proses dan koordinasi untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati. Di dalam organisasi terdapat bagian-bagian yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan kegiatan koordinasi, misalnya divisi hubungan masyarakat, *officer*, bagian personalia, sekretaris, bendahara, hingga ketua koordinasi.

Bagian-bagian (divisi) di dalam organisasi sangat beragam, tergantung sesuai dengan bidang organisasi tersebut. Organisasi mempunyai divisi berdasarkan tujuan organisasi. Namun, dari keberagaman divisi tersebut ada beberapa divisi yang umum dan pasti ada di dalam setiap tubuh organisasi. Divisi tersebut adalah koordinator organisasi, yaitu pihak yang menjadi titik utama dalam kelangsungan kegiatan organisasi. Ada beberapa istilah yang dapat menggambarkan pihak yang bertugas untuk memimpin organisasi, yaitu koordinator, manajer,

ketua, pemimpin, presiden, direksi, dan sebagainya. Skripsi ini akan lebih condong dengan istilah koordinator.

Berkaitan dengan tugas setiap divisi dalam lingkaran organisasi, koordinator memiliki otoritas (wewenang) untuk memimpin organisasi. Salah satu karakteristik dasar dari struktur birokrasi dalam organisasi adalah memiliki satu dan satu-satunya pusat dari otoritas. Peran ini biasanya dipegang oleh kepala organisasi. Kepala organisasi menjadi puncak dari rantai komando, sebagai otoritas tertinggi di dalam struktur internal dan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pihak dari luar misalnya komunitas dan pemerintah (Etzioni, 1959).

Herbert Simon dalam Agion dan Tireore (1997: 1) mendefinisikan otoritas sebagai hak untuk memilih tindakan yang mempengaruhi sebagian atau seluruh organisasi. Telah disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa organisasi memiliki kepala organisasi yang memiliki otoritas, maka dari itu, kepala organisasi mempunyai hak untuk melakukan tindakan terhadap organisasi yang dibawahinya. Namun, otoritas yang dilakukan oleh kepala organisasi tetap memiliki batasan ketika pelaksanaannya.

## 2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metodologi kualitatif untuk memahami permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Metodologi penelitian kualitatif dirasa cocok karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan suatu proses koordinasi. Ada beberapa pandangan mengenai penelitian kualitatif menurut ahli.

Menurut Moleong (2006: 6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena tersebut dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, dll., dipahami secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dilihat penjabaran oleh Moleong, maka penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah, artinya penelitian dilakukan tanpa memanipulasi objek dengan berbagai variabel.

Peneliti kualitatif tertarik untuk meneliti bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, bagaimana pertanyaan tertentu dijawab, pemaknaan masing-masing orang terhadap kata-kata tertentu, bagaimana perilaku manusia diterjemahkan dalam aktivitas (Fraenkel dan Wallen, 2006). Jadi hasil penelitian benar-benar menggambarkan sesuai dengan fakta

yang ada. Kemudian peneliti menuangkan hasil penelitian dengan pendeskripsian menggunakan kata-kata dan bahasa.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan kehidupan di dalam tubuh organisasi, tepatnya adalah kewenangan dari sosok koordinator. Peneliti ingin mengupas secara gamblang proses koordinasi yang berlangsung di dalam kerja sama dan jaringan Jogjalib for All. Penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai proses koordinasi dari berbagai arah, tidak hanya dari BPAD DIY. Perpustakaan anggota jaringan juga diperlukan informasinya, bagaimana pendapat mereka mengenai kewenangan dari BPAD DIY atas Jogjalib for All. Oleh karena data yang diperlukan cukup banyak, maka metode penelitian ini adalah naratif.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah kebijakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta sebagai koordinator jaringan Jogjalib for All. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan otoritas BPAD DIY dalam mengkoordinasi Jogjalib for All.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasan (2002: 21) menjelaskan tentang data primer adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”. Penulis membuat rancangan wawancara dan peninjauan langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data primer. Wawancara tersebut dilakukan kepada staf dan pustakawan BPAD DIY yang menjadi penanggung jawab atas JLA..

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan menggunakan dokumen yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Data penelitian bisa didapatkan dengan metode wawancara. Menurut Bhattacharjee (2012: 78) wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang lebih personal daripada metode kuesioner. Pewawancara menggunakan protokol penelitian yang sama seperti kuesioner, yaitu dengan satu set daftar pertanyaan. Tetapi, tidak seperti metode kuesioner, skrip dapat berisi instruksi khusus pewawancara yang tidak dilihat oleh responden. Selain itu juga dimungkinkan jika peneliti dapat merekam wawancara tersebut.

Wawancara dalam penelitian ini adalah hal yang paling utama dalam proses pengumpulan data. Wawancara mampu memberikan informasi yang jelas

dan sesuai dengan kebutuhan data untuk penelitian. Sebelum dilaksanakan wawancara, penulis merancang beberapa pertanyaan. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik dan cara. Menurut Sugiyono (2008: 233) ada beberapa metode wawancara sebagai berikut.

1. Wawancara Terstruktur
2. Wawancara Semi Terstruktur
3. Wawancara Tak berstruktur

Dikarenakan informasi yang kompleks dan melalui berbagai sudut pandang, maka metode wawancara yang paling tepat untuk penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Proses wawancara dilakukan dengan bertatap langsung terhadap informan, kemudian dicatat dan direkam menggunakan *recorder*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang dan sampel penelitian berjumlah 10 orang.

Selain menggunakan wawancara, penulis juga menggunakan metode studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mengetahui misalnya peristiwa di masa yang telah lewat. Sebagai contohnya adalah mengoleksi data dari surat. Sugiyono (2008: 240) mengatakan hal demikian, bahwa dokumen catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Data hasil wawancara dan studi dokumen kemudian dianalisis untuk mendapatkan makna. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengolah hasil catatan wawancara. Catatan oleh peneliti tersebut dibuat menjadi tabel sebagaimana yang terdapat pada lampiran agar lebih mudah untuk dipahami. Dari sekian hasil wawancara, tidak semuanya dimasukkan ke dalam tabel dikarenakan ada beberapa informasi yang tidak dibutuhkan untuk pengolahan menjadi bentuk narasi oleh peneliti.

Selain analisis data dengan cara mereduksi hasil wawancara, peneliti juga menganalisis dari dokumen. Analisis data tersebut dengan cara membaca data yang ada dalam dokumen dan disesuaikan dengan hasil wawancara. Kemudian menyambungkan kedua data tersebut apakah sejajar atau bertolak belakang. Namun, seperti pada hasil wawancara, data yang ada di dalam dokumen tidak semuanya dianalisis, hanya sebagian data yang dianalisis.

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Moleong (2000: 178) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu. Peneliti menggunakan tiga

metode triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa fokus, setidaknya ada delapan fokus pembahasan. Delapan fokus tersebut didapat dari dua pertanyaan penelitian inti. Pertanyaan penelitian yang pertama mengenai manajerial kerja sama dan jaringan perpustakaan secara umum, misalnya tujuan jaringan, peraturan jaringan, proses rekrutmen anggota, dan pembahasan mengenai OPAC. Sedangkan pertanyaan penelitian yang kedua adalah tentang manajerial anggota jaringan (para perpustakaan).

#### 3.1 Tujuan

Di wilayah provinsi Yogyakarta, ada puluhan perpustakaan berdiri. Di antaranya terdapat perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, serta perpustakaan umum dan khusus. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh BPAD berinisiatif untuk mengintegrasikan berbagai perpustakaan yang ada di Yogya tersebut. Akhirnya, sekitar tahun 2005 pada bulan November, terbentuklah jaringan kerja sama Jogjalib for All.

Perlu diketahui, tujuan dibentuknya Jogjalib for All. Pertama pembentukan JLA merupakan ide awal untuk membuat layanan silang layan. Silang layan dalam arti pemustaka bisa meminjam koleksi bahan pustaka di perpustakaan yang dia bukan anggota di dalamnya. Tetapi tujuan membentuk silang layan tidaklah mudah. Sampai saat ini, silang layan masih menjadi proyek yang dalam tahap uji coba.

Menurut salah satu informan, pelaksanaan silang layan dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Hal tersebut karena pada tahun ini BPAD dibantu dengan tim pengembang telah membuat sistem default untuk silang layan koleksi di web JLA. Layanan silang layan tersebut akan dilaksanakan pada dua perpustakaan, yaitu perpustakaan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

JLA dapat dikatakan sebagai portal informasi di kawasan Yogyakarta. Sebagai portal informasi, masyarakat bisa mengakses sumber informasi dalam satu katalog saja. Tidak hanya mengakses dan mengetahui keberadaan informasi tersebut, namun masyarakat Yogyakarta juga bisa memanfaatkan, dalam menggunakan sumber tersebut. Pemustaka yang telah menjadi member JLA bisa mendatangi perpustakaan yang tergabung dalam JLA, tanpa harus menjadi memernya terlebih dahulu. Namun, pemustaka tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku di perpustakaan yang akan didatangi. Semisal

masyarakat umum biasa harus membayar tarif penuh untuk masuk ke perpustakaan tertentu, dengan bantuan JLA pemustaka bisa mendapatkan potongan harga dari tarif normal. Beberapa perpustakaan yang mengikuti Jogjalib for All memberikan biaya masuk kepada pemustaka umum, jika pemustaka memiliki kartu Jogjalib for All maka dapat dipastikan akan mendapat potongan dari biaya tersebut.

Web resmi Jogjalib for All ada di alamat [www.jogjalib.com](http://www.jogjalib.com). Karena telah disarankan oleh informan, maka peneliti melakukan pengambilan data, khususnya data mengenai tujuan dibentuknya JLA. Web resmi JLA memberikan tiga poin utama yang menjelaskan tujuan dibentuk layanan Jogjalib for All. di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Membangun jaringan kerja sama antar perpustakaan,
2. Meningkatkan pelayanan akses informasi koleksi perpustakaan melalui media yang seragam serta berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperluas cakupan pengguna layanannya, dan
3. Meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat khususnya dunia pendidikan, serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna perpustakaan khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mendukung kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan tujuan wisata.

Objektif yang sama juga ditemukan di India. Negeri tersebut juga terdapat beberapa jaringan perpustakaan, salah satunya adalah Delnet (Delhi Library Network). Delnet memiliki tujuan yang sama dengan JLA, yaitu untuk memfasilitasi pemustaka sebagai pusat rujukan dan pusat penelitian, serta untuk mempertahankan katalog induk dari segala bahan pustaka yang bisa dijadikan referensi. Delnet juga menyebarkan informasi sumber bahan pustaka melalui media yang telah terkomputerisasi (Musthafa, 2002: 41).

#### 3.2 Peraturan Jogjalib for All

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan penyebaran informasi, jaringan perpustakaan membutuhkan dasar atau asas untuk keberlangsungan pelaksanaan. Adanya peraturan yang diterapkan di dalam jaringan perpustakaan akan lebih mengikat kepada perpustakaan-perpustakaan yang menjadi anggotanya. Seperti yang dijelaskan oleh Ishak (2008), bahwa salah satu syarat untuk melakukan kerja sama perpustakaan adalah adanya aturan atau kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis.

Jogjalib for All telah memenuhi syarat administrasi sebagai jaringan perpustakaan yang melakukan kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

oleh peneliti, Jogjalib for All mempunyai peraturan / kesepakatan tertulis dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*). Dari seluruh informan, menjawab sama, yaitu peraturan yang dilaksanakan dibuat dalam bentuk MoU.

Selain MoU, informan menambahkan penjelasan aturan lain yang diberlakukan di dalam Jogjalib for All, yaitu SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh BPAD DIY. Salah satu SK yang disebutkan oleh informan adalah SK mengenai pembentukan tim pengembang pada tahun 2016. Kepala BPAD DIY menerbitkan Surat Keputusan yang memutuskan siapa saja yang akan menjadi tim pengembang, selain itu juga ada Surat Keputusan penunjukan PIC masing-masing perpustakaan unit. Penjelasan mengenai tim pelaksana kegiatan pengembangan JLA akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

Hasil analisis peneliti, di dalam MoU terdapat sebelas pasal yang terdiri dari definisi, obyek, ruang lingkup, hak, kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, evaluasi, penyelesaian perselisihan, *force majeure*, dan lain-lain. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa MoU yang dimiliki oleh peneliti adalah MoU yang ditandatangani dari empat belas instansi. Instansi tersebut telah sepakat untuk melanjutkan kerja sama pengembangan dan pemanfaatan sumber informasi Jogja Library for All di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menandakan bahwa MoU dari empat belas instansi tersebut telah habis masa berlakunya, yang kemudian para kepala instansi bersedia untuk melanjutkan berbagi sumber informasi melalui JLA.

### 3.3 Proses Keanggotaan Jogjalib for All

Jogjalib for All bisa memiliki jumlah anggota yang semakin banyak karena bagi perpustakaan yang tergabung di dalamnya akan mendapatkan sejumlah profit. Perpustakaan yang mendaftar dan kemudian lolos hingga menjadi anggota JLA akan memberikan nilai tambah untuk akreditasi perpustakaan. Maka dari itu, setiap tahun ada beberapa perpustakaan yang ingin menjadi anggota baru di jaringan JLA. Karena ada begitu banyak perpustakaan yang ingin bergabung, maka BPAD DIY selaku pemimpin jaringan ini memberlakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota baru. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, BPAD DIY perlu melakukan proses seleksi terhadap pendaftar anggota baru Jogjalib for All.

Menurut informan, proses penambahan anggota ke dalam Jogjalib for All ada beberapa tahap. Sebelumnya, perpustakaan harus mendaftar dengan cara mengajukan permohonan kepada BPAD DIY. Permohonan tersebut intinya adalah ingin mengikuti JLA. Setelah permohonan diterima, maka selanjutnya

akan menjadi agenda untuk BPAD DIY. Pihak BPAD DIY kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan survei ke lapangan atau ke perpustakaan calon anggota baru JLA.

Survei yang dilakukan oleh BPAD DIY bersifat teknis. Maksudnya adalah survei tersebut meninjau jaringan yang ada di dalam perpustakaan. Berhubung Jogjalib for All adalah sarana integrasi *database* perpustakaan berbasis teknologi informasi yaitu internet, maka perpustakaan harus menggunakan sistem yang telah terotomasi. Hasilnya adalah, perpustakaan yang telah menggunakan otomasi sistem, maka *database* dapat diharvest ke *server* JLA.

BPAD DIY juga menilai dari sisi kelengkapan koleksi. Menurut informan, selain *database* yang bisa diharvest ke *server* JLA, variasi koleksi bahan pustaka menjadi aspek yang bisa dijadikan skala prioritas. Perpustakaan yang memiliki jenis koleksi yang lebih bervariasi, apalagi memiliki koleksi langka, dapat dipastikan akan lebih diprioritaskan. Hal tersebut dikarenakan akan menambah kelengkapan katalog induk Jogjalib for All. *Web* JLA akan menampilkan data koleksi perpustakaan yang lebih banyak macamnya, yang memberikan nilai lebih terhadap pemustaka Jogjalib for All.

Hal terakhir yang menjadi dasar dalam penambahan anggota baru adalah dengan adanya sumber dana. Adanya pembentukan anggaran dari BPAD DIY untuk menambah anggota JLA juga mempengaruhi. Seperti pernyataan dari informan lain, anggaran untuk pengembangan JLA semuanya berasal dari BPAD DIY.

Anggaran tersebut berasal dari pemerintah daerah yang diberikan kepada BPAD DIY untuk mengelolanya. Padahal, seperti yang kita tahu, anggaran merupakan permasalahan yang sangat umum terjadi di Indonesia. Maka dari itu, jumlah anggaran yang disediakan sangat mempengaruhi rekrutmen anggota baru JLA.

Sangat jelas bahwa dalam hal ini BPAD DIY memiliki kewenangan untuk memilih siapa saja yang pantas menjadi anggota baru JLA. BPAD DIY memutuskan siapa saja yang menjadi anggota baru dengan dasar melihat calon anggota baru apakah lulus kualifikasi yang diberikan oleh BPAD DIY. Selain atas dasar kualifikasi, BPAD DIY juga mendengar masukan dari tim pengembang untuk menilai perpustakaan bisa ikut dalam jaringan atau tidak. Hal terakhir yang mempengaruhi kewenangan untuk tidak menerima semua pendaftar JLA karena adanya keterbatasan dana.

### 3.4 OPAC Jogjalib for All



Gambar 1. OPAC Jogjalib for All ([www.jogjalib.com](http://www.jogjalib.com), 2016)

Jaringan perpustakaan berbasis teknologi informasi diterapkan pada Jogjalib for All. Dibantu dengan internet, Jogjalib for All menggabungkan seluruh *database* katalog dari masing-masing perpustakaan unit. Hal ini menunjukkan adanya satu katalog induk yang bersumber dari 40 katalog perpustakaan anggota JLA. Situs resmi Jogjalib for All dapat diakses melalui [www.jogjalib.com](http://www.jogjalib.com). Maka dapat diartikan bahwa Jogjalib For All menggunakan sistem *online public access catalogue* (OPAC).

OPAC Jogjalib for All dapat diakses secara luas oleh masyarakat bahkan masyarakat di luar daerah Yogyakarta. Masyarakat dapat mencari bahan pustaka dibantu dengan sistem OPAC yang telah menggabungkan *database* dari 40 katalog perpustakaan yang ada di provinsi DIY. Sehingga, layanan katalog *online* yang diberikan oleh Jogjalib for All telah meningkatkan kualitas temu balik informasi karena dengan OPAC tersebut pencarian akan lebih efisien.

Sistem yang digunakan di dalam OPAC JLA adalah OAI-PMH (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting*). Secara singkat, Pendit (2007) menjelaskan bahwa OAI-PMH merupakan standar yang dapat diikuti oleh pengembang *web* khususnya dalam hal penyimpanan dan penemuan data kembali. Jika pembuat sebuah *database* metadata menggunakan standar OAI-PMH, maka mesin pencari dapat mengharvest informasi metadata tersebut, dan menyelaraskan informasi itu dengan yang didapatkan dari tempat lain. Pada intinya, OAI-PMH merupakan penghubung antara metadata katalog perpustakaan unit ke metadata Jogjalib For All. Setiap perpustakaan unit memiliki sistem metadata katalog yang berbeda-beda, maka dengan adanya sistem OAI-PMH membuat satu himpunan besar yang berisi metadata-metadata tersebut.

Setelah mengetahui sistem metadata untuk pengumpulan semua katalog perpustakaan anggota JLA, maka perlu diketahui apa perangkat lunak yang dipakai sebagai OPAC. Jika OAI-PMH merupakan

sistem metadata, maka Vufind adalah perangkat lunak untuk pencarian bahan pustaka. Beberapa informan menjelaskan Vufind sebagai *software* temu balik informasi.

OPAC yang dimiliki oleh Jogjalib for All merupakan hasil dari tujuan dibentuk program kerja sama antar perpustakaan di Yogyakarta. BPAD DIY selaku pemimpin jaringan ini, dibantu dengan tim pengembang JLA telah membuat katalog *online* bersama. Secara teknis, pembuatan OPAC ini tidak dilakukan oleh pihak BPAD DIY maupun tim pengembang. Pada dasarnya, tim pengembang bertugas sebagai pemberi ide dan usulan, sedangkan BPAD DIY merupakan pihak yang menjadi otoritas dalam pembuatan keputusan.

Jogjalib for All telah menggunakan OPAC sejak beberapa tahun yang lalu. OPAC tersebut dirancang oleh BPAD DIY dan tim pengembang, namun dieksekusi oleh pihak ketiga. Pada tahun ini, ada program *upgrade web* dan OPAC untuk penambahan beberapa fitur. Sama seperti pembuatan OPAC sebelumnya, pada proses *upgrade* yang dilakukan pada tahun ini JLA mendapatkan rekanan baru, yaitu PT Teknologi Kode Indonesia atau disebut dengan TLab.

Informan menjelaskan alasan mengapa BPAD Yogyakarta lebih memilih menggunakan pihak ketiga untuk membuat *web* dan sistem otomatis Jogjalib for All. Pihak ketiga yang dimaksud adalah TLab. Alasannya karena BPAD DIY tidak memiliki sumber daya manusia untuk membuat program sebesar Jogjalib for All. Perlu diketahui, untuk membuat sebuah program berbasis TI memerlukan keahlian khusus, seperti menguasai bahasa pemrograman tersebut. Umumnya, pustakawan tidak memiliki keahlian tersebut, kecuali pustakawan melakukan kursus atau kembali ke bangku kuliah dan melanjutkan dengan program studi informatika dsb.

Pemilihan TLab sebagai pihak ketiga untuk pengembangan fitur *web* dan OPAC Jogjalib for All tidak dilakukan dengan penunjukan langsung. Melainkan ada proses yang berlangsung sebelumnya. Adanya tim pengembang JLA memberikan masukan dalam rangka pengembangan OPAC kepada BPAD DIY. Setelah kualifikasi OPAC dibentuk, maka BPAD Yogyakarta menyerahkan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tender lelang yang dibuat BPAD DIY melalui ULP secara *online* (e-lelang) akan diketahui oleh masyarakat, tentunya perusahaan yang bekerja pada bidang teknologi atau *web developer*. Cara lelang elektronik juga merupakan salah satu peningkatan

pelayanan publik terhadap masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu proses lelang, akan memberikan kemudahan proses lelang mulai dari pendaftaran, pelaksanaan lelang, hingga pengumuman lelang.

Pengumuman pemenang lelang oleh ULP akan secara otomatis diberitahukan melalui *web*. Bagi perusahaan yang memberikan penawaran paling rendah, akan menjadi pemenang lelang sehingga perusahaan tersebut menjadi rekanan untuk pengerjaan proyek. Pada kasus ini, PT. Teknologi Kode Indonesia (TLab) adalah perusahaan yang menjadi pemenang lelang.

### 3.5 Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan PIC Jogjalib for All

Adanya berbagai perubahan yang ditunjukkan Jogjalib for All merupakan hasil dari pemikiran yang dituangkan dari tim pengembang. Jogjalib for All mempunyai tim pengembang sejumlah dua belas orang, yang kebanyakan berasal dari BPAD DIY, beberapa pustakawan perguruan tinggi, dosen teknik informatika, dan pustakawan perpustakaan umum. Selain adanya tim pengembang, ada juga PIC (*Person in Charge*) dari masing-masing perpustakaan. Setiap perpustakaan memiliki dua PIC. Tugasnya adalah untuk penghubung antara perpustakaan unit kepada JLA.

Tim pengembangan Jogjalib For All tidak terbentuk begitu saja. Namun ada proses pembentukan yang dilakukan oleh BPAD DIY. Beberapa informan mengatakan tidak mengetahui bagaimana proses pembentukan tim pengembang tersebut.

Menurut informan, tim pengembang langsung ditunjuk oleh BPAD DIY, dan tidak ada proses musyawarah terlebih dahulu. Setelah mendapatkan rekomendasi untuk menanyakan langsung kepada BPAD DIY, peneliti kemudian melakukan investigasi ke informan lain yang berasal dari BPAD DIY. Peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu proses pemilihan tim pengembang.

Menurut informan dari BPAD DIY (ada tiga informan dari BPAD DIY), semua nama yang ada dalam daftar tim pengembang memang ditunjuk langsung oleh BPAD DIY. Selebihnya dijelaskan alasannya karena jika melalui proses penawaran, maka tidak akan ada yang mau menjadi anggota tim pengembang. Selain itu, tidak ada syarat apa pun dari BPAD DIY untuk menjadi tim pengembang.

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan lain dari BPAD DIY, sebelumnya ada *sounding* (penawaran) untuk tim pengembang. BPAD DIY telah melakukan

penawaran bagi siapa saja yang ingin menjadi anggota tim pengembang JLA. Tetapi, informan tersebut juga mengatakan bahwa tim pengembang “diambil” dari anggota JLA. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tim pengembang benar-benar ditunjuk langsung oleh BPAD DIY, dan dapat disimpulkan bahwa ketika penawaran tidak ada satu orang pun yang mau menjadi tim pengembang. Satu-satunya dasar penunjukan tim pengembang adalah mereka yang ditunjuk merupakan personil-personil dari anggota Jogjalib for All yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi.

Tim pengembang yang telah ditunjuk secara langsung disahkan melalui SK (Surat Keputusan) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/KEP/2016. Surat keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 10 Februari 2016 dan ditandatangani oleh kepala BPAD DIY. Ada beberapa inti yang dapat diambil di dalam SK tersebut (sebagaimana yang ada dalam lampiran), antara lain sebagai berikut:

1. Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Jogja Library for All
2. Menjelaskan tugas dari setiap jabatan tim pengembang. Struktur personalia tim pengembang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua bertugas untuk melakukan koordinasi dan pemantauan penyelenggaraan dan merumuskan pengembangan sistem JLA. Selain itu juga merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) *Upgrade* Aplikasi JLA.
  - b. Sekretaris bertugas untuk menghimpun dan menyusun hasil koordinasi serta menyiapkan dan menyelesaikan administrasi dalam pengembangan JLA. Sekretaris juga ikut serta dalam merumuskan KAK *upgrade* aplikasi JLA dan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara tertulis kepada BPAD DIY.
  - c. Anggota bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pelayanan serta pengembangan JLA dan ikut merumuskan KAK *upgrade* aplikasi JLA bersama ketua dan sekretaris.
3. Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Tim dapat berhubungan dan meminta konfirmasi serta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya.

5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan tersebut dibebankan pada APBD DIY pada BPAD DIY.

Selain tim pengembang, masih ada satu pihak yang menjadi motor Jogjalib for All, yaitu PIC (*Person in Charge*). Berdasarkan materi Rapat Kerja Jogja Library for All pada tanggal 25 Februari 2016, informan menjelaskan PIC JLA adalah seorang pustakawan atau pegawai perpustakaan yang oleh kepala perpustakaan diamanahi untuk menjalankan tugas tambahan yang berkaitan dengan JLA. Ketika telah bersedia menjadi PIC maka wajib untuk mengetahui bentuk layanan JLA, manfaat dan tujuannya diadakan JLA dan memahami apa saja tugas dan tanggung jawabnya serta mengetahui kendala apa saja yang akan dihadapi dalam pelayanan JLA serta mengetahui cara mengatasinya.

Selain itu, informan menambahkan adanya kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap PIC JLA. Kompetensi tersebut antara lain akrab dengan dunia internet, mempunyai komunikasi efektif, mempunyai kemampuan untuk menulis berita atau artikel, dan mempunyai kemampuan tentang pemasaran. Selain itu, PIC juga memiliki beberapa tanggung jawab. Bagi siapa pun yang menjadi PIC JLA maka wajib melengkapi konten yang berkaitan dengan institusi, menerima dan memverifikasi pendaftar JLA (*membership*), mengisi berita dan artikel, mensosialisasikan JLA kepada pemustakanya, dan memastikan kelancaran *web* / evaluasi program.

Kompetensi dan tanggung jawab seorang PIC JLA diajukan dalam rapat kerja yang dilakukan segenap anggota JLA. Berbeda dengan tim pengembang, proses pemilihan PIC terdapat semacam omongan terlebih dahulu. Para anggota JLA membahas persyaratan dan tanggung jawab PIC. Hal tersebut menjadi masukan kepada BPAD DIY untuk memutuskan apa saja yang menjadi wewenang dari PIC.

### 3.6 Komunikasi di dalam Jogjalib for All

Komunikasi merupakan hal yang utama dalam organisasi. Semua hal yang dikomunikasikan akan membuatnya lebih bermakna, membuat arti yang dapat diketahui secara luas. Sesuatu dapat diartikan komunikasi jika dilakukan secara dua arah. Berarti, individu yang melakukan komunikasi lebih dari satu sisi.

Sama halnya yang ada di dalam tubuh Jogjalib for All. Ada beberapa peserta komunikasi di dalam internal JLA, yaitu BPAD DIY, Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan, dan PIC. Selain itu, ada juga pihak

eksternal yang tetap melakukan komunikasi dengan JLA, misalnya seperti TLab.

Pelaksanaan komunikasi memerlukan sebuah media. Hal tersebut wajib karena media merupakan salah satu unsur komunikasi. Jika tidak ada media ketika komunikasi berlangsung, maka komunikasi tersebut bersifat langsung (bertatap muka). Salah satu kelemahan jika berkomunikasi langsung bertatap muka adalah tidak semua orang dapat hadir langsung untuk berkomunikasi. Apalagi komunikasi dalam sebuah organisasi yang memuat puluhan manusia. Jogjalib for All merupakan salah satu organisasi yang memiliki banyak pihak yang saling berkaitan.

Ketika melakukan komunikasinya sehari-hari, Jogjalib for All lebih sering menggunakan media aplikasi *chat* pada *smartphone*, yaitu *WhatsApp*. Tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi yang satu ini memang hampir terpasang pada setiap *smartphone*.

Informan menjelaskan adanya media lain selain *WhatsApp* yaitu melalui *e-mail*. Komunikasi yang dilakukan melalui *WhatsApp* bukan komunikasi yang dilakukan secara *person to person*, namun *person to group*. Yaitu adanya grup yang menggabungkan beberapa orang, antara lain tim pengembang dan PIC. Dijelaskan lebih lanjut bahwa ada perbedaan grup bagi tim pengembang dan PIC. Perbedaan dibentuk karena pada dasarnya dua pihak tersebut memiliki perbedaan kepentingan. Adanya grup akan memudahkan penyebaran informasi. Jika ada informasi untuk melakukan pertemuan, dengan cepat informasi tersebut menyebar ke seluruh anggota. Informasi tersebut akan lebih sampai terlebih dahulu kepada tim pengembang dan PIC, sebelum surat resmi dikirimkan.

Walaupun telah menggunakan media grup yang disediakan oleh *WhatsApp*, BPAD Yogyakarta selaku koordinator juga menjalin komunikasi secara resmi melalui surat. Surat resmi atau surat dinas menjadi sarana yang lebih mengikat kepada pihak yang dituju. Apalagi surat tersebut dikirim oleh atasan. Sebagai lembaga di bawah naungan pemerintah daerah, BPAD DIY tetap menerapkan etika dalam kedinasan. Surat yang diterbitkan oleh BPAD DIY contohnya adalah surat keputusan yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Selain itu surat undangan untuk rapat JLA.

Informan menjelaskan bahwa ada forum yang mempertemukan tim pengembang, PIC, dan BPAD DIY. Forum bersama tersebut juga merupakan sarana komunikasi yang dilakukan oleh JLA. Setidaknya ada dua forum utama dalam satu tahun. Pertama adalah Rapat Koordinasi, yaitu adalah rapat antara BPAD DIY dengan semua kepala perpustakaan anggota JLA.

Kedua adalah Rapat Kerja, yaitu rapat bersama antara BPAD DIY dengan PIC. Kedua rapat tersebut, juga dihadiri oleh tim pengembang.

BPAD DIY berwenang untuk selalu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh khususnya tim pengembang. Setiap ada pembaruan informasi, selalu ada sepengetahuan dari BPAD DIY. Apalagi pada tahun ini ada banyak perombakan yang dilakukan oleh tim pengembang, seperti misalnya *upgrade* OPAC JLA dan perumusan sistem silang layang yang akan menjadi layanan baru Jogjalib for All.

### 3.7 Monitoring dan Evaluasi

Salah satu otoritas yang dimiliki oleh BPAD Yogyakarta adalah melakukan monitor dan evaluasi (Monev). Monitor yang dilakukan oleh BPAD DIY ditujukan kepada tim pengembang dan PIC. Monitor tersebut dilakukan oleh BPAD DIY untuk dapat selalu mengikuti segala perkembangan yang dilakukan khususnya oleh tim pengembang. Cara yang dilakukan oleh BPAD DIY dalam memonitor tim pengembang salah satunya melalui rapat yang diadakan dalam kurun waktu satu bulan sekali. BPAD DIY mengundang tim pengembang secara rutin agar segala pencapaian dan kendala dapat diketahui dengan cepat.

Sedangkan evaluasi lebih ditujukan kepada PIC, namun tetap ada evaluasi secara keseluruhan bagaimana pencapaian JLA pada tahun 2016. Evaluasi diadakan ketika melaksanakan rapat koordinasi. Pada tahun ini, rapat koordinasi telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2016. Pada saat rapat tersebut, BPAD DIY mengevaluasi keaktifan dari masing-masing perpustakaan. Ditampilkan statistik keaktifan berdasarkan *login* dari PIC. Jika PIC jarang *login* ke *web*, maka secara otomatis perpustakaan tersebut kurang aktif apalagi berkontribusi untuk *posting* artikel. Namun, sebagai pemimpin jaringan, BPAD DIY melakukan pendekatan dengan perpustakaan-perpustakaan yang kurang aktif. BPAD DIY menanyakan apa yang menjadi kendala dalam melakukan tugasnya sebagai PIC dan sebagainya.

Mengetahui adanya perpustakaan yang kurang aktif, tidak membuat BPAD DIY untuk melakukan tindakan yang serius, misalnya mengeluarkan perpustakaan tersebut dari JLA. Kebanyakan hanya diperingatkan secara lisan ketika ada rapat koordinasi. Namun, menurut informan, tahun depan direncanakan untuk memulai sistem *reward and punishment*.

### 3.8 Dukungan BPAD DIY kepada Jogjalib for All

Pada kegiatan jejaring perpustakaan di Yogyakarta ini, BPAD DIY telah melakukan sesuai dengan salah satu fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Fayol (1925) yaitu adanya semangat kesatuan. Semangat kesatuan dapat dibuktikan dengan adanya dukungan moril, memberikan dorongan dalam bentuk psikologis kepada anggota. Dorongan tersebut dilakukan juga untuk mengajak para anggota untuk saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan. Hal tersebut telah dilakukan oleh BPAD DIY kepada anggota JLA.

Informan menyebutkan adanya dukungan moril pada akhir penjelasannya. Dukungan tersebut diberikan ketika adanya rapat koordinasi yang dilakukan oleh Jogjalib for All. BPAD DIY mengapresiasi kepada semua anggota yang menurutnya aktif dalam menjalani kegiatan jejaring perpustakaan. Maksud aktif tersebut merupakan anggota yang dilihat dari statistik *login*, seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Namun, dalam mengapresiasi BPAD DIY hanya sekedar mengapresiasi, tidak ada semacam *reward* yang diberikan kepada anggota yang aktif. Sedangkan untuk anggota yang tidak aktif, BPAD DIY melakukan pendekatan tersendiri.

Selain dukungan moril, dukungan dalam bentuk materiil juga diberikan oleh BPAD DIY sebagai koordinator JLA. Seluruh informan menegaskan bahwa BPAD DIY mendukung dalam bentuk dana. Seluruh anggaran yang digunakan untuk keperluan kegiatan JLA ditanggung oleh BPAD DIY. Anggaran yang diberikan oleh digunakan untuk penyediaan *server web*, untuk anggaran pertemuan rutin, intensif yang diberikan kepada PIC (namun sudah dihapus), dan pembiayaan yang diberikan kepada tim pengembang.

Dukungan dalam bentuk dana memang sangat penting diberikan. Berhubung BPAD DIY merupakan penanggung jawab pada kerja sama dan jaringan Jogjalib for All. BPAD DIY mendapatkan anggaran dana dari pemerintah daerah DIY, dan diberikan khusus untuk pengembangan Jogjalib for All. Memang tidak bisa dipungkiri, tanpa dana akan menjumpai kesulitan, pertama untuk melakukan pertemuan, dan kedua untuk melakukan *upgrading web* JLA. Namun, tidak masalah jika insentif untuk PIC dihilangkan, karena tugas PIC untuk mengentry data telah dimudahkan dengan adanya sistem OAIPMH yang ada dalam katalog induk JLA.

Maka, dikarenakan BPAD DIY merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jaringan perpustakaan ini secara tidak langsung juga didukung oleh pemerintah daerah.

Dukungan pemerintah daerah akan kemajuan pengembangan sumber informasi di Yogyakarta merupakan nilai tambah tersendiri karena tidak semua provinsi di Indonesia memiliki jaringan dan kerja sama perpustakaan.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai otoritas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai koordinator kerja sama dan jaringan Jogjalib for All, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Jogjalib for All merupakan sebuah organisasi pada bidang perpustakaan, khususnya jaringan perpustakaan yang memiliki pusat jaringan. Pusat jaringan tersebut terdapat pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya pusat jaringan akan menimbulkan adanya kesatuan komando (terdapat satu koordinator) sehingga anggota jaringan tidak memiliki arah masing-masing.

Sebagai koordinator jaringan perpustakaan, BPAD DIY tetap memiliki hak atau wewenang atau otoritas untuk melakukan tindakan terhadap Jogjalib for All. BPAD DIY melaksanakan kewenangannya sebagai koordinator menunjukkan ketegasan dalam berorganisasi dan juga menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab untuk mengurus para anggotanya. Kemudian, otoritas yang diberikan kepada BPAD DIY juga telah dilaksanakan dengan baik. Artinya, BPAD DIY melaksanakan kewenangannya sehingga terlihat sebagai koordinator yang otoriter.

#### Daftar Pustaka

- Agion, Phillipe, dan Jean Tirole. 1997. "Formal and Real Authority in Organization." *The Journal of Political Economy* (The University of Chicago Press) 105 (1): 1-29.
- Babbie, Earl. 2008. *The Basic of Social Research*. Belmont: Thomson Higher Education.
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*. [http://scholarcommons.usf.edu/oa\\_textbooks/](http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/) 3.
- Borm, Julien Van, dan Natalia Sokolova. 2004. "From Library Co-operation to Consortia: Comparing Experiences in the European Union with the Russian Federation." *Liber Quarterly* 440-450.
- Clayton, Peter, dan G. E. Gorman. 2001. *Managing Information Resources in Library*. London: Facet Publishing.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Etzioni, Amitai. 1959. "Authority Structure and Organizational Effectiveness." *Administrative Science Quarterly* 43-67.
- Fraenkel, Jack R., dan Norman E. Wallen. 2006. *How to Design and Evaluate in Research*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Thamrin. 2007. "Kerjasama Antar Jaringan Perpustakaan." *Rapat Koordinasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Se Pekanbaru*. Pekanbaru.
- Ishak. 2008. *Kerjasama Antar Jaringan Perpustakaan*. Medan: Fakultas Sastra USU.
- Ivanko, Štefan. 2013. *Modern Theory of Organization*. Ljubljana: University of Ljubljana: Faculty of Public Administration.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Mohamed. 2002. *ResearchGate*. Januari. Diakses Oktober 10, 2016. <https://www.researchgate.net/publication/207598292>.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pendit, Putu Laksman. 2007. "Serba Open di Jagat Informasi: Memahami OA, OAI, dan OAIS dan Hubungannya dengan Kemelekan Informasi." *Seminar dan Pelatihan: Kemelekan Informasi: Keberlangungannya dari Sekolah ke Perguruan Tinggi*. Karawaci: Universitas Pelita Harapan.
- Sudjarwo, dan Basrowi. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo-Basuki. 1996. *Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sulistyo-Basuki. 1992. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.